

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) satuan kerja perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2021-2026 Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan program dan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada. Peraturan Menteri Dalam Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahwa perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan umum di Provinsi. Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tersebut Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah sebagai landasan pembentukan perangkat daerah. Salah satu diantara Peraturan Daerah tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 tentang Organisasi tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mempunyai tugas Pokok "***Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik***" sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi. Dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jambi membantu Gubernur dalam Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Partisipasi Politik, Pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat indikator, tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan dan target pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan perubahan RENSTRA 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi didasarkan kepada :

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1967 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
10. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang RPJMD 2021-2026;
18. Peraturan Gubernur Jambi Nomor Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk memberikan arahan rencana yang memuat indikator program, kegiatan, sub kegiatan dan target serta pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD. Tujuan disusunnya Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun ke depan.
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA PD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renstra Perangkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.Latar Belakang
- 2.Landasan Hukum
- 3.Maksud dan Tujuan
- 4.Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAMBI

- 1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.Sumber Daya Aparatur
- 3.Kinerja Pelayanan SKPD
- 4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- 1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
- 2.Telaahan Visi, Misi, Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 1.Rencana Program
- 2.Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : P E N U T U P

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2008 , Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi , dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang yaitu :

1. Sekretariat
2. Bidang Partisipasi Politik
3. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan
4. Bidang Fasilitasi Organisasi Politik Masyarakat dan Lembaga Perwakilan.
5. Bidang Penanganan Konflik

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 mengatur bahwa Sekretaris dan 4 (empat) Bidang sebagaimana yang tertera dalam Perda Nomor 15 Tahun 2008, masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk dapat merealisasikan Tupoksi dimaksud, secara struktural dibantu oleh beberapa Sub Bagian/Bidang sebagai berikut :

1. Sekretariat :
 - (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur dilingkungan Badan Kesatuan bangsa dan Politik;
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Membuat perumusan perencanaan dan program serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyusun anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - c. Melaksanakan administrasi dan tata usaha;

- d. Mengelola perlengkapan, kepegawaian dan urusan rumah tangga;
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat terdiri dari :

1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan surat menyurat tata usaha pimpinan serta kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Mengelola urusan administrasi kepegawaian, barang, perawatan dan pemeliharaan Inventaris Kantor;
 - b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dinas dan keamanan kantor;
 - c. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata usaha, surat-menyurat dan kearsipan badan Kesbangpol;
 - d. Melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas;
 - e. Menyiapkan usulan pengangkatan bendaharawan;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan analisis jabatan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.2 Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub bagian keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran belanja, penatausahaan dan verifikasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bagian keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan penyusunan rencana anggaran;
 - b. Melaksanakan penanganan administrasi keuangan;
 - c. Menyusun laporan pelaksanaan anggaran;

- d. Melaksanakan urusan kas dan gaji;
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.3 Sub Bagian Perencanaan Program , Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

- (1) Sub bagian Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan bahan evaluasi, penyusunan program dan penyusunan rencana kerja Badan Kesbangpol.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bagian perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan, meng sistimasi kan data dan penyusun rencana serta program kerja;
 - b. Menganalisis data hasil pelaksanaan program kerja serta penyusunan laporan;
 - c. Menyusun data statistik dan dokumentasi hasil pelaksanaan tugas;
 - d. Menyiapkan dan menghimpun peraturan perundangan yang berhubungan dengan tugas Badan Kesbangpol;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

2. Bidang Partisipasi Politik

- (1) Bidang Partisipasi Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Badan Kesbangpol di bidang Fasilitasi dan pengembangan, Partisipasi politik dan budaya politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Partisipasi Politik mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan kebijakan fasilitasi, pengembangan partisipasi politik;
 - b. Melaksanakan perumusan kebijakan fasilitasi Pemilihan Umum;

- c. Menyiapkan perumusan kebijakan komunikasi politik dan Sosialisasi Undang-undang politik;
- d. Merumuskan kebijakan pengembangan etika politik, pendidikan politik;
- e. Menyiapkan perumusan kebijakan pengembangan budaya politik;
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Partisipasi Politik Terdiri dari :

2.1 Sub Bidang Partisipasi Politik

- (1) Sub Bidang Partisipasi Politik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan fasilitasi, pengembangan dan partisipasi politik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bidang partisipasi politik mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan program kerja untuk fasilitasi, pengembangan partisipasi politik;
 - b. Melaksanakan penyiapan program kerja yang berkaitan dengan fasilitasi pemilihan umum dan pilkada;
 - c. Monitoring dan evaluasi situasi politik daerah;
 - d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.2. Sub Bidang Budaya Politik

- (1) Sub Bidang Budaya Politik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pendidikan politik dan pengembangan budaya politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bidang budaya politik mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan program kerja tentang komunikasi politik dan sosialisasi Undang-undang politik;
 - b. Melaksanakan penyiapan nahan perumusan kebijakan program kerja untuk pengembangan etika politik dan pendidikan politik;

- c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan program kerja untuk pengembangan budaya politik;
- d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan

- (1) Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perkuatan pengembangan wawasan kebangsaan, memfasilitasi dan pembinaan pembauran bangsa, meningkatkan kesadaran bela negara serta resapan ideologi Negara di kalangan masyarakat dalam rangka tetap mempertahankan nilai-nilai kesatuan dan persatuan bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama;
 - b. Melaksanakan dan meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial di lingkungan masyarakat;
 - c. Melakukan peningkatan dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
 - d. Melakukan pemasyarakatan pembauran kebangsaan dalam rangka integrasi masyarakat;
 - e. Melakukan pembinaan dan koordinasi dalam proses penyiapan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesadaran bela negara;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan terdiri dari :

3.1 Sub Bidang Wawasan Kebangsaan

- (1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan, pembauran bangsa dan kewarganegaraan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan;
 - b. Melaksanakan kegiatan interaksi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis melalui interaksi dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pembauran dan perekonomian;
 - c. Melaksanakan kegiatan pembauran dan kewarganegaraan;
 - d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3.2 Sub Bidang Bela Negara

- (1) Sub Bidang Bela Negara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bela negara, ideologi dan kewaspadaan Nasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Bela Negara mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan pembinaan kesadaran bela negara;
 - b. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengembangan ideologi dan kewaspadaan nasional;
 - c. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

4. Bidang Fasilitasi Organisasi Politik Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan

- (1) Bidang fasilitasi Organisasi Politik Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan fasilitasi organisasi politik,

organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perwakilan dan organisasi keagamaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Fasilitasi Organisasi Politik, Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kebijakan, memfasilitasi dan pengawasan terhadap organisasi partai politik, kemasyarakatan, lembaga perwakilan dan organisasi keagamaan;
- b. Melaksanakan kebijakan dan fasilitasi pengembangan organisasi profesi dan kemasyarakatan;
- c. Melakukan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga perwakilan;
- d. Melakukan evaluasi, komunikasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait organisasi politik, kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga perwakilan;
- e. Memfasilitasi lembaga perwakilan;
- f. Melakukan sosialisasi kebijakan peraturan organisasi kemasyarakatan dan politik;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Fasilitasi Organisasi Politik Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan terdiri dari :

4.1 Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Lembaga Perwakilan

(1) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Lembaga Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan persiapan kebijakan perumusan dan fasilitasi partai politik dan organisasi profesi serta lembaga-lembaga perwakilan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Lembaga Perwakilan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan persiapan kebijakan perumusan fasilitasi partai politik, organisasi profesi dan lembaga perwakilan;
- b. Melakukan kerja sama, komunikasi, konsultasi dengan parpol;
- c. Melakukan evaluasi pengawasan berkaitan dengan kegiatan partai politik;
- d. Melaksanakan kegiatan fasilitasi organisasi politik, kemasyarakatan dan lembaga perwakilan;
- e. Mengumpulkan, mengolah data yang berhubungan dengan organisasi Partai Politik dan Lembaga Perwakilan;
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

4.2 Sub Bidang Organisasi Masyarakat , LSM dan Keagamaan.

- (1) Sub Bidang Organisasi Masyarakat, LSM dan Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan fasilitasi dan pengembangan organisasi masyarakat, organisasi keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bidang organisasi keagamaan dan Lembaga swadaya masyarakat, LSM dan Keagamaan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan penyiapan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi keagamaan;
 - b. Melakukan komunikasi koordinasi dan kerjasama dengan lembaga keagamaan, LSM dan organisasi kemasyarakatan;
 - c. Mengumpulkan dan mengolah data yang berhubungan dengan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi keagamaan;
 - d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Penanganan Konflik

- (1) Bidang Penanganan konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesbangpol di bidang penanganan konflik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan analisis potensi konflik;
 - b. Melaksanakan kebijakan dan memfasilitasi koordinasi, rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan konflik;
 - c. Melaksanakan penanganan konflik yang bersumber dari kegiatan sosial, ekonomi, dan lalu lintas orang asing;
 - d. Melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintah;
 - e. Melaksanakan evaluasi, koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat dalam memelihara stabilitas ketertiban dan ketentraman masyarakat;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penanganan Konflik terdiri dari :

5.1 Sub Bidang Analisis Potensi Konflik

- (1) Sub Bidang Analisis Potensi Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan yang menyangkut kebijakan fasilitas analisis potensi konflik, fasilitasi rekonsiliasi sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Potensi Konflik mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kebijakan fasilitasi, analisis potensi konflik yang bersumber dari kerawanan sosial;
 - b. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dengan penanganan berbagai konflik sosial;

- c. Melakukan evaluasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelesaian penanganan konflik secara utuh dan berkesinambungan;
- d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

5.2 Sub Bidang konflik Pemerintah dan Keamanan

- (1) Sub bidang konflik pemerintahan dan keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan fasilitasi, rehabilitasi dan rekonstruksi konflik pemerintahan dan keamanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Konflik Pemerintahan dan keamanan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kebijakan memfasilitasi, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat konflik pemerintahan dan keamanan.
 - b. Melaksanakan penyiapan perumusan dan memfasilitasi penanganan konflik pemerintahan dan keamanan;
 - c. Melaksanakan rekonsiliasi mentalitas masyarakat secara utuh guna menumbuh kembangkan kembali semangat kebersamaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Melakukan evaluasi dan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan konflik secara utuh dan berkesinambungan;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta eksistensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menuju kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

saat ini mempunyai tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 51 (Lima puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari :

1. Pejabat Struktural 17 Orang
2. Staf/Pelaksana 34 Orang

Secara keseluruhan komposisi jabatan, memuat susunan struktural Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jambi
(data Agustus 2021)

No.	Sekretariat/Bidang	PNS			HONORER			Total
		L	P	JML	L	P	JML	
1.	Sekretariat	8	6	14	2	5	7	20
2.	Bidang Partisipasi Politik	4	4	7	1	1	2	9
3.	Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan	8	3	10	-	1	1	10
4.	Bidang Fasilitasi Organisasi Politik Masyarakat dan Lembaga	6	4	10	2	1	3	13
5.	Perwakilan Bidang Penanganan Konflik	5	3	7	1	1	2	13
	Jumlah	31	20	51	6	9	15	66

Sumber : Data Kepegawaian Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, Agustus 2021

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jambi
Menurut Esselonering
(data Agustus 2021)

No.	Esselon	A		B		Jumlah	Ket.
		L	P	L	P		
1.	II	1	-	-	-	1	
2.	III	4	1	-	-	5	
3.	IV	9	2	-	-	11	
	Jumlah	14	3	-	-	17	

Sumber : Data Kepegawaian Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, Agustus 2021

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jambi
Menurut Jenis Pendidikan Terakhir
(data Agustus 2021)

No.	Strata Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Ket.
1.	S 2	9	-	9	
2.	S 1	20	16	45	
3.	D 3	-	1	1	
4.	SLTA	3	2	5	
	Jumlah	31	20	51	

Sumber : Data Kepegawaian Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, Agustus 2021

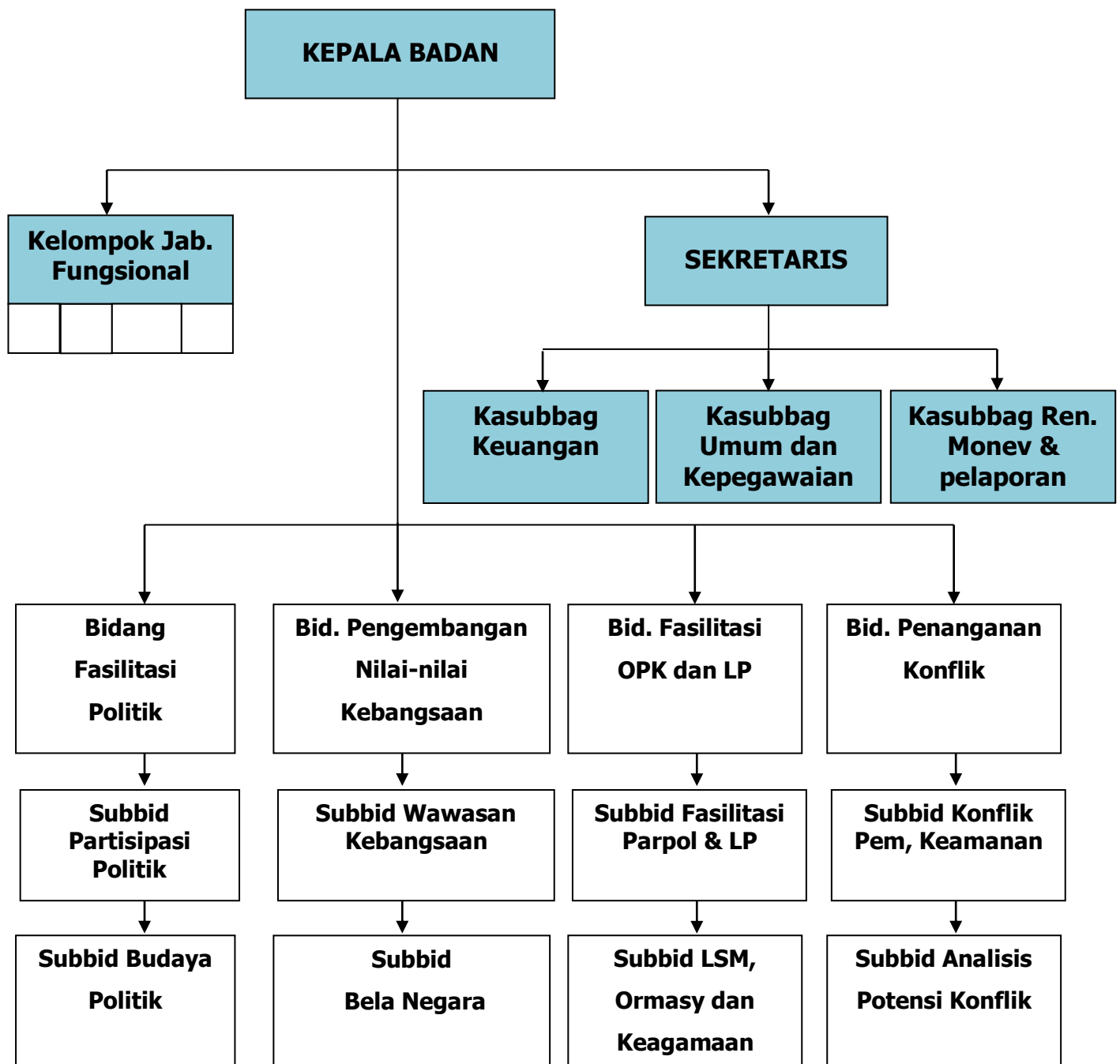
Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jambi
Menurut Jenis Golongan
(data Agustus 2021)

No.	Golongan	A		B		C		D		JML
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	IV	4	-	9	1	1	-	-	-	15
2	III	2	2	2	8	5	5	4	4	32
3	II	-	-	1	-	-	-	1	2	4
	Jumlah	6	2	12	9	6	5	5	6	51

Sumber : Data Kepegawaian Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, Agustus 2021

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESBANGPOL PROVINSI JAMBI
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 15 TAHUN 2008



2.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, sebagai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan juga didukung oleh sumber daya sarana dan prasarana yang memadai, seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Rekapitulasi Barang Inventaris
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
(data Desember 2021)

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI	
				B	KB
I	Tanah dan Bangunan	15,21	M2		
II	KENDARAAN :				
	1.Roda 2	14	UNIT	10	4
	2.Roda 4	8	UNIT	6	2
III	APK :				
	1.Lemari Kayu	25	BUAH	18	7
	2.Filling Kabinet	8	BUAH	5	3
	3.Papan Tulis	4	BUAH	4	-
	4.Kursi Putar	45	BUAH	37	8
	5.Kursi Biro	7	BUAH	7	-
	9.Meja Biro	14	BUAH	10	4
	10.Meja ½ Biro	40	BUAH	23	17
	11.Televisi	7	UNIT	7	-
	12.Bagan Struktur	1	BUAH	1	-
	13.Komputer (PC)	14	UNIT	11	3
	14.Laptop	12		8	4
	15.AC	23	UNIT	17	6
	16.Infocus	1	UNIT	1	-
	17.Printer	13	UNIT	10	3

Tabel 2.7

Rencana Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi Saat Ini		Jumlah Rencana Pengadaan	Jumlah Kondisi Akhir
		Baik	KB	2022	
1	AC 2 Pk	2	-	2	2
2	AC 1 Pk	2	-	2	2
3	Filling Kabinet	2	-	2	2
4	Kursi Kantor	17	-	17	17
5	Pc All In One	2	-	2	2
6	Laptop	2	-	2	2
7	Printer G4010	2	-	2	2
8	Printer Epson	2	-	2	2

Tabel 2.8

Rencana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi Saat Ini		Jumlah Rencana Pemeliharaan	Jumlah Kondisi Akhir
		Baik	KB	2022	
1	Minibus	8	6	8	8
2	Bangunan/Gedung Kantor	1	-	1	1
3	AC	17	6	23	23
4	PC (Komputer)	11	3	14	14
5	Printer	10	3	13	13

2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja jumlah anggaran dan realisasi pendanaan Badan Kesbang dan Politik Provinsi Jambi Periode Tahun 2016 – 2021 tabel berikut ini :

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(output)	TARGET NSPK		TARGET IKK		TARGET RENSTRAPERANGKAT DAERAH TAHUN KE										REALISASI CAPAIAN TAHUN KE										RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE									
	K		K		2016		2017		2018		2019		2020		2016		2017		2018		2019		2020		2016		2017		2018		2019		2020	
	Rp.(000)		Rp.(000)		Rp.(000)		Rp.(000)		Rp.(000)		Rp.(000)		Rp.(000)		Rp.(000)		Rp.(000)		Rp.(000)		Rp.(000)		Rp.(000)		K		K		K		K		K	
	4	5	4	5	7	8	9	10	11	7	8	9	10	11	7	8	9	10	11	7	8	9	10	11	7	8	9	10	11	7	8	9	10	11
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	74	1.146.853.900	100	8.965.312.953	80	1.146.853.900	84	1.037.968.749	88	993.125.870	92	971.243.000	96	828.175.618	80	1.132.717.454	84	1.001.678.295	88	967.517.354	92	932.376.105	96	752.571.888	100	98,77	100	96,50	100	97,42	100	96,00	100	90,87
Terakomodirnya kelengkapan surat menyurat selama 1 tahun		34.380.000		18.900.000		34.380.000		34.380.000		18.900.000		18.900.000		18.900.000		34.380.000		34.380.000		18.900.000		18.900.000		18.900.000		100		100		100		100		100
Pembayaran telepon,air listrik dan jasa lainnya		151.818.000		132.000.520		151.818.000		137.000.000		124.000.000		143.500.000		175.000.350		140.112.754		109.566.238		105.437.200		132.867.964		111.672.588		92,29		79,98		85,03		92,59		63,81
Terpenuhinya kelengkapan jasa Pengelolaan keuangan selama 1 tahun		105.046.200		8.209.515.516		105.046.200		108.120.000		101.418.000		104.604.000		104.604.000		105.046.200		101.769.000		99.085.386		100.317.000		92.604.000		100,00		94,13		97,70		95,90		88,53
Terjaganya kebersihan lingkungan kantor		160.000.000				160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		159.600.000		159.600.000		156.400.000		159.600.000		159.994.000		99,75		99,75		97,75		99,75		100
Terciptanya kelancaran Kerja		63.800.000		123.468.625		63.800.000		63.800.000		80.000.000		54.450.000		45.700.000		63.789.000		63.800.000		80.000.000		44.792.000		45.700.000		99,98		100,00		100,00		82,26		100
terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor		91.431.500		49.843.566		91.431.500		70.665.400		63.129.400		53.639.000		36.576.000		91.418.600		70.665.400		63.129.400		53.638.970		36.576.000		99,99		100		100		100		100
Persentase Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai bagi aparat		60.775.000		50.486.250		60.775.000		73.168.750		59.275.000		43.383.000		50.383.000		60.775.000		73.150.000		59.275.000		38.282.200		50.383.000		100,00		99,97		100,00		88,24		100
Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik		25.035.000		25.804.236		25.035.000		25.035.000		25.035.000		18.905.000		25.035.000		25.003.500		25.029.000		25.035.000		10.697.500		25.035.000		99,87		99,98		100,00		56,59		100

Terakomodirnya informasi secara akurat		10.000.000		14.109.240		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		9.900.000		9.900.000		9.900.000		9.900.000		9.960.000		99,00		99,00		99,00		99,00		99,60	
Terselenggaranya Rapat		27.840.000		49.550.000		27.840.000		27.840.000		28.200.000		28.200.000		28.200.000		27.777.500		27.831.000		28.188.720		28.178.450		28.200.000		99,78		99,97		99,96		99,92		100,00	
Terselenggaranya koordinasi kedalamdan keluar daerah		416.728.200		291.635.000		416.728.200		327.959.599		323.168.470		335.662.000		173.777.268		414.914.900		325.987.657		322.166.648		335.202.021		173.547.300		99,56		99,40		99,69		99,86		99,87	
Persentase Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai Bagi aparat	70	538.220.000	100	515.472.850	80	538.220.000	85	496.360.000	90	440.446.447	95	1.026.497.000	100	461.849.904		529.348.176		477.661.737		428.395.240		1.005.681.700		452.207.450	100	98,35	100	96,23	100	97,26	100	97,97	100	97,91	
terpenuhinya peralatan kantor		108.000.000		87.090.000		108.000.000		76.800.000		111.547.000		700.000.000		163.352.904		107.675.000		76.490.000		109.862.640		700.000.000		163.131.250		99,70		99,60		98,49		100,00		99,86	
Tersedianya jasa pemeliharaan Peralatan gedung kantor		196.750.000		184.196.000		196.750.000		199.500.000		84.499.447		82.097.000		82.097.000		195.900.000		199.450.000		84.152.999		81.158.000		80.186.000		99,57		99,97		99,59		98,86		97,67	
Tesedianya jasa pemeliharaan kendaraandinas/operasional kantor		233.470.000		244.186.850		233.470.000		220.060.000		244.400.000		244.400.000		216.400.000		225.773.176		201.721.737		234.379.600		224.523.700		208.890.200		96,70		91,67		95,90		91,87		96,53	
Persentase Peningkatan kapasitas Sumber daya yang berkualitas	61 org	32.000.000	84 org	48.100.000	61	32.000.000	65	43.200.000	70	56.550.000	75	48.750.000	80	48.750.000	84	29.200.000		43.200.000		52.648.050		48.750.000					91,25		100,00		93,10		100,00		100
Tersedianya Pakaian Dinas Harian	61 org	32.000.000	84 org	48.100.000		32.000.000		43.200.000		56.550.000		48.750.000		48.750.000		29.200.000		43.200.000		52.648.050		48.750.000		48.750.000			91,25		100,00		93,10		100,00		100
Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur	88 %	18.182.000	100 %	22.078.000	90	18.182.000	92	23.000.000	94	23.000.000	96	12.500.000	98	-	100	18.182.000		22.298.500		23.000.000		3.500.000		-			100,00		96,95		100,00		28,00		-
Tersedianya aparat yang berkualitas dan provensial		18.182.000		22.078.000		18.182.000		23.000.000		23.000.000		12.500.000		-		18.182.000		22.298.500		23.000.000		3.500.000		-			100,00		96,95		100,00		28,00		-
Pencapaian Penatausahaan keuangan Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Kesbangpol	70 %	338.773.930	90 %	224.247.925	80	338.773.930	85	338.124.291	90	316.886.000	95	280.000.000		135.300.000		331.530.302		329.844.000		311.525.297		275.831.048		133.410.400	100	97,86	100	97,95	100	98,31	100	98,51	100	98,60	
Tersusunnya laporan program dan kegiatan serta rencana kerja Bankesbangpol		76.801.600		60.708.000		76.801.600		137.726.600		121.987.000		75.000.000		25.616.000		76.792.600		134.408.750		121.303.873		72.766.000		25.568.000		99,99		97,59		99,44		97,02		99,81	
Terlaksananya Rapat Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Programdan Kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politikse Provinsi Jambi.		261.972.330		163.539.925		261.972.330		200.397.691		194.899.000		205.000.000		109.684.000		254.737.702		195.435.250		190.221.424		203.065.048		107.842.400		97,24		97,52		97,60		99,06		98,32	
Aspek Indeks KebebasanBerkeyakinan	77 %	1.229.488.670	80,47 %	1.654.000.000	80,47%	1.229.488.670	4,27	1.198.736.570	88,07%	1.096.766.613	81,87	982.368.000	95,67%	689.946.550		1.164.602.304		1.171.322.967		1.082.187.885		902.119.038		674.542.031	100	94,72	100	97,71	100	98,67	100	91,83	100	97,77	
Meningkatnya pembinaan antar suku dan etnis		160.280.000				160.280.000		152.280.000		162.840.000		175.238.000		246.453.550		150.062.800		150.487.750		158.931.840		125.977.700		241.676.550		93,63		98,82		97,60		71,89		98,06	
Terlaksananya pendidikan pendidikan wawasan kebangsaan.		146.797.150				146.797.150		131.797.150		151.109.500		156.308.000		84.431.200		135.397.200		129.824.000		150.882.836		149.110.500		81.691.100		92,23		98,50		99,85		95,40		96,75	

Meningkatnya rasa patriotisme dancintatanahairdikala nganpelajar dangenerasimuda		211.933.000				211.933.000	152.090.500		524.559.113		294.573.000		115.408.000		209.542.504		148.262.500		520.520.008		291.707.173		110.669.000		98,87		97,48		99,23		99,03		95,89
		442.512.320				442.512.320	398.000.000	-							430.521.000		393.479.000							97,29	98,86		-		-		-		
tersusunnya data penunjangrencanaa ksiindeksdemokrasi Indonesia (IDI)Daerahdi Prov.Jambi		13.278.200				13.278.200	117.880.920	-			80.100.000		19.278.800		13.278.200		109.651.920		-		65.070.000		19.278.800		100,00	93,02		-		81,24		100	
Meningkatnya kerukunanumatbera gamadiProvinsiJambi		254.688.000				254.688.000	246.688.000		258.258.000		276.149.000		224.375.000		225.800.600		239.617.797		251.853.202		270.253.665		221.226.581		88,66	97,13		97,52		97,87		98,60	
Nilai RAD Penanganan Konflik Sosial	97	1.175.616.200	100 %	3.871.400.000	97 %	1.175.616.200	1.122.351.200	98,5 %	1.000.308.200	99 %	1.850.259.000	99,5 %	418.246.100		1.049.953.647		1.119.220.385		994.902.891		1.774.638.618		414.689.882	100	89,31	100	99,72	100	99,46	100	95,91	100	99,15
Terlaksananya pemantauan danpembinaan FKDMKabupaten/kota		354.480.000				354.480.000	348.645.000		308.150.000		712.232.000		153.284.000		353.005.775		348.645.000		305.962.135		688.471.418		152.522.000		99,58	100,00		99,29		96,66		99,50	
Terwujudnya pelayanan/pene rbitanrekomend asipenelitian		39.699.800				39.699.800	33.699.800		29.484.000		25.061.000		0		38.640.104		33.336.000		28.723.313		22.609.200		0		97,33	98,92		97,42		90,22		-	
TerlaksananyaPenangan konflikolehTim Terpadu (TIMDU)		345.976.000				345.976.000	311.676.000		285.962.000		792.762.000		118.446.000		344.022.268		311.676.000		285.876.211		744.212.000		117.908.300		99,44	100,00		99,97		93,88		99,55	
TerlaksananyapembinaanPemantauanterhadapkegiatan tenaga gasing, peneliti/tenaga ahliasing, rohaniawan, LSMasing danlembagaasingdi ProvinsiJambi		136.758.000				136.758.000	163.228.000		146.905.200		124.869.000		62.880.400		16.276.000		160.689.800		146.273.508		124.411.000		62.807.882		11,90	98,44		99,57		99,63		99,88	
TerlaksananyaPemantauandapemetaanPotensiKonflikdiProvinsiJambi		145.412.400				145.412.400	126.412.400		112.986.000		96.038.000		46.955.800		145.023.400		126.412.400		112.601.848		95.638.000		46.955.800		99,73	100,00		99,66		99,58		100,00	
Terlaksananyasosialisas itentangpencegahanpen yalahgunaan narkoba diProvinsi Jambi		153.290.000				153.290.000	138.690.000		116.821.000		99.297.000		36.679.900		152.986.100		138.461.185		115.465.876		99.297.000		34.495.900		99,80	99,84		98,84		100,00		94,05	
Persentase partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaanPemiluKepalaDaerah	66	731.606.200	70,5 %	1.066.000.000	66,43 %	731.606.200	753.856.200	68,40 %	920.945.580	69,0 %	865.803.000	69,90 %	415.358.606		631.173.700		737.570.232		900.595.353		848.290.445		414.676.436	100	86,27	100	97,84	100	97,79	100	97,98	100	99,84
Partisipasi Politik Masyarakat,Meningkatnyapemahaman masyarakatterhada		280.603.200		7.416.466.667		280.603.200	392.853.200		589.841.680		501.365.000		230.038.250		268.735.200		382.363.050		572.736.271		497.191.869		229.993.200		95,77	97,33		97,10		99,17		99,98	

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Peningkatan persatuan dan kesatuan Bangsa merupakan pondasi sebagai tolak ukur bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan daerah, dimana pemerintahan yang beragam suku, ras, agama dan budaya berdampak meningkatnya potensi konflik sosial yang cukup tinggi dan dapat mengancam integrasi nasional.

Dari permasalahan diatas dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kondisi Politik.

Permasalahan Politik secara Nasional secara tidak langsung berdampak terhadap Kondisi politik di Provinsi Jambi,

a. Pendidikan politik

Pendidikan Politik merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Dalam renstra badan Kesbangpol Provinsi Jambi tahun 2021-2026 pendidikan politik masih ditujukan untuk kalangan pemilih pemula yang baru akan berpartisipasi dalam pemilihan umum, dan pemilih perempuan yang masih banyak beranggapan bahwa politik itu tidak penting dan merupakan urusan para kaum lelaki. Maka dari itu untuk menghilangkan stigma tersebut, untuk pendidikan politik lebih diarah kan pada pemahaman mengenai esensi ilmu politik, etika politik, dan perkembangan budaya politik saat ini, serta aturan-aturan baru yang terkait dengan partai politik dan pemilihan umum.

b. Partisipasi masyarakat dalam pemilu

Mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilu, jika dilihat dari persentase partisipasi masyarakat pada saat pemilihan umum legislatif dan presiden, dan pada saat pemilihan kepala daerah provinsi jambi dalam 2 periode terakhir persentasenya naik turun. Pada pemilihan umum legislatif dan

presiden pada tahun 2014 mencapai 77,2% (untuk pileg) dan 70,6% (untuk pilpres), sedangkan pada saat pilgub 2015 turun menjadi 67,8%. Pada saat pileg dan pilpres tahun 2019 naik kembali mencapai 81,77 % melebihi target nasional 77,5%, namun pada pilgub tahun 2020 turun lagi menjadi 67,9%. Jika dikelompokkan masing-masing, pada dasarnya persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu mengalami kenaikan dari periode sebelumnya sehingga usaha menaikkan partisipasi masyarakat dapat dikatakan berhasil walaupun belum sempurna. Fenomena naik turunnya partisipasi masyarakat pada saat pileg pilpres dengan pilgub ini masih menjadi permasalahan yang harus segera ditemukan solusinya, sehingga untuk pemilu yang selanjutnya hal tersebut tidak terjadi, dan dapat stabil mengalami kenaikan dengan target dapat memenuhi target nasional baik itu untuk pileg pilpres maupun pilgub yang akan datang.

2. Kondisi Wawasan Kebangsaan.

Cara pandang masyarakat mengartikan pentingnya Rasa cinta tanah air dan nasionalisme dalam memperkuat persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah mulai luntur, juga masih terdapat perbedaan pendapat dan pemahaman yang berbeda dalam berkeyakinan sehingga berpotensi menimbulkan perpecahan antar agama, suku dan etnis.

3. Kondisi Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi khususnya pada Bidang Fasilitasi Organisasi Politik Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan dimana untuk meningkatkan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) hal ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman kerjasama departemen dalam negeri dan pemerintah daerah dengan

organisasi kemasyarakatan dan lembaga niraba lainnya dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Kondisi sosial budaya : masih terbukanya kesempatan pengembangan budaya lokal sebagai aset budaya nasional yang diikuti meningkatnya kreativitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat NKRI. Sehingga makin mantapnya kehidupan sosial budaya yang berkepribadian dinamis dan berdaya tahan terhadap pengaruh budaya asing sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Provinsi Jambi yang agamis dengan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap laten ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

4. Kondisi Keamanan

Permasalahan keamanan dan ketertiban di Provinsi Jambi secara keseluruhan termasuk dalam kategori aman dan terkendali, ruang lingkup penanganan konflik sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik, meliputi:

1. Pencegahan Konflik.
2. Penghentian Konflik.
3. Pemulihan Paska konflik.

Adapun potensi konflik sosial terdiri dari :

1. Konflik yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosial budaya.
2. Konflik yang berkaitan dengan perseteruan antar suku, antar umat beragama, antar etnis dan antar umat beragama.
3. Konflik yang berkaitan dengan batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/ atau Provinsi.
4. Konflik yang berkaitan dengan sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau anatar masyarakat dengan pelaku usaha.

5. Konflik yang berkaitan dengan distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Adapun konflik yang banyak terjadi di daerah Provinsi Jambi meliputi konflik agama, suku dan ras, konflik sengketa lahan, dan konflik politik. Sehingga perlu diadakan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga ketentraman dan ketertiban daerah.

Upaya pencegahan konflik yang telah dilakukan :

- a. Memelihara kondisi yang damai dalam masyarakat.
- b. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai.
- c. Memecah potensi konflik.
- d. Membangun sistem penyelesaian secara damai.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi memberikan sejumlah layanan baik layanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

a. Pelayanan Internal

- 1) Penyusunan program Badan;
- 2) Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, penyajian, dan pemeliharaan data Badan;
- 3) Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program Badan;
- 4) Penyusunan laporan Badan;
- 5) Penyusunan perbendaharaan keuangan Badan;
- 6) Pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
- 7) Pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;

- 8) Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
- 9) Pengelolaan kearsipan;
- 10) Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
- 11) Pengelolaan data kepegawaian Badan;
- 12) Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan.

b. Pelayanan Eksternal

- 1) Penyiapan bahan perizinan mahasiswa yang mengadakan penelitian;
- 2) Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada ormas;
- 3) Fasilitasi terhadap kegiatan Tim Terpadu Penanganan Keamanan Dalam Negeri (TIMDU);
- 4) Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- 5) Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
- 6) Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- 7) Fasilitasi layanan dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan;
- 8) Fasilitasi upaya pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, serta bela negara.

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-						REALISASI ANGGARAN TAHUN KE						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN						RATA -RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017
	Program Pelayanan Perkantoran	452.542	614.216	669.842	684.350	1.303.324	1.317.709	241.180	542.111	593.196	650.605	1.248.478	1.292.817	53,29	88,26	88,56	95,07	95,77	98,11	19,50	32,29
1	Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat	1,500	1,500	1,500	62,000	31,500	31,500	896	977	1,500	61,140	31,500	31,500	59.73	65.13	100	98.61	100	100.00	66,10	81,00
2	Kegiatan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	78,000	138,000	144,000	114,500	150,000	131,049	896	66,646	73,458	85,360	118,389	117,151	1.15	48.29	51.01	74.55	78.93	89.39	9,03	125,29
3	Kegiatan jasa administrasi keuangan	47,370	52,770	62,370	67,998	82,815	87,411	896	52,768	59,620	66,093	82,815	87,409	1.89	100	95.59	97.20	100	100.00	10,75	109,27
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	87,600	87,600	97,800	99,000	150,000	144,305	896	87,500	97,707	98,883	149,622	144,305	1.02	99.89	99.90	99.88	99.75	100.00	8,67	133,25
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	16,000	10,000	10,000	22,256	35,000	40,000	15,974	9,895	10,000	22,255	35,000	39,984	99.84	98.95	100	100	100	99.96	16,50	16,49
6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	12,123	19,992	22,453	25,921	111,963	111,073	12,123	19,991	22,453	25,921	94,074	103,904	100	99.99	100	100	84.02	93.55	44,65	43,06
7	Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	12,060	22,250	22,250	20,725	64,529	61,690	12,060	22,230	22,250	20,375	64,515	58,552	100	99.91	100	98.31	99.98	94.91	31,26	30,13
8	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,989	5,012	5,012	4,640	82,362	92,986	3,989	5,012	1,964	4,640	82,073	92,338	100	100	39.19	100	99.65	99.30	69,02	68,82
9	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12,000	9,000	9,000	13,350	10,000	10,000	12,000	9,000	8,996	12,840	7,878	9,900	100	100	99.96	96.18	78.78	99.00	(2,99)	(3,16)
10	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan	127,900	158,092	185,457	8,400	28,900	607,695	127,450	158,092	185,248	8,400	28,900	607,774	99.65	100	99.89	100	100	100.00	29,66	29,74

	konsultasi keluar daerah																				
11	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang administrasi/ teknis pemerintah daerah	54,000	110,000	110,000	245,560	556,555	-	54,000	110,000	110,000	244,698	553,712	-	100	100	100	99.65	99.49	-	59,45	59,29
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		587.260	745.809	1.171.140	590.880	1.296.863	558.800	574.139	742.589	1.125.362	541.368	1.257.691	539.195	97,77	99,57	95,09	91,62	96,98	96,49	(0,82)	(1,04)
1	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	410,460	185,860	758,500	183,000	607,624	-	398,660	183,140	749,045	163,400	587,824	-	97.13	98.54	98.75	89.29	96.74	-	8,16	8,08
2	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor	81,500	156,765	255,050	98,300	257,159	107,500	80,318	156,765	247,122	98,100	242,002	104,500	98.55	100	96.89	99.80	94.11	97.21	4,72	4,48
3	Pengadaan Mebeleur	-	113,855	9,500	64,870	-	-	-	113,855	9,400	64,700	-	-	-	100	98.95	99.74	-	-	(17,10)	(17,17)
4	Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	8,000	8,140	23,000	13,500	25,000	176,000	7,996	8,140	17,260	13,500	25,000	176,000	99.95	100	75.04	100	100	100.00	67,39	67,41
5	Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan dinas/operasional	87,300	107,115	125,090	141,210	252,300	275,300	87,165	107,115	102,535	111,922	248,965	258,695	99.85	100	81.97	79.26	98.68	93.97	21,10	19,88
6	Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	174,074	-	90,000	154,780	-	-	173,574	-	89,746	153,900	-	-	99.71	-	99.72	99.43	-	2,89	2,96
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		18.000	23.200	23.325	24.000	26.800	28.000	18.000	23.200	21.525	23.600	26.400	25.200	100	100	92,28	98,33	98,51	90,00	9,24	8,78
1	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	18,000	23,200	23,325	24,000	26,800	28,000	18,000	23,200	21,525	23,600	26,400	25,200	100	100	92.28	98.33	98.51	90.00	7,64	5,77
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		24.552	40.000	50.000	340.000	40.000	40.000	24.552	40.000	34.258	34.750	39.850	39.950	100	100	68,52	10,22	99,63	99,88	8,47	8,45
1	Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	24,552	40,000	50,000	340,000	40,000	40,000	24,552	40,000	34,258	34,750	39,850	39,950	100	-	68.52	10.22	99.63	-	8,47	8,45
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		75.143	60.000	86.301	116.924	194.680	345.477	75.143	60.000	85.743	116.560	194.680	320.489	100	100	99,35	99,69	100	92,77	28,95	27,35
1	Kegiatan Pembinaan dan pengembangan perencanaan Realisasi program kesbang dan politik provinsi jambi	75,143	60,000	86,301	116,924	194,680	345,477	75,143	60,000	85,743	116,560	194,680	320,489	100	100	99.35	99.69	100	92.77	28,95	27,35
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		208.023	396.125	647.162	903.838	1.084.719	639.871	208.023	395.140	605.712	902.820	-	-	100	99,75	93,60	99,89	-	-	20,60	44,34

1	Kegiatan pembinaan dan pematapan eksistensi KOMINDA Provinsi Jambi	208,023	396,125	647,162	903,838	-	-	208,023	395,140	605,712	902,820	-	-	100	99.75	93.60	99.89	-	-	44,38	44,34
2	Kegiatan Tim Terpadu penanganan gangguan keamanan di Provinsi Jambi Tahun 2014	-	-	-	-	1,084,719	639,871	-	-	-	-	1,079,654	622,981	-	-	-	-	99.53	97.36	(23,20)	(24,04)
Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal		414.231	527.200	438.914	804.290	903.129	515.476	408.690	510.409	437.998	760.634	897.874	461.709	98,66	96,82	99,79	94,57	99,42	89,57	3,71	2,05
1	Kegiatan pembinaan dan pematapan orang asing, LSM asing (NGO) dan Lembaga asing	98,157	152,300	125,103	235,673	383,416	242,788	98,157	148,735	125,055	234,709	379,055	227,813	100	97.66	99.96	99.59	98.86	93.83	16,29	15,05
2	Kegiatan Pembinaan Kerukunan umat beragama dalam rangka menciptakan keharmonisan antar umat	257,666	249,900	211,982	480,617	308,379	272,688	256,236	236,675	211,114	437,925	307,499	233,896	99.45	94.71	99.59	91.12	99.71	85.77	0,95	(1,51)
3	Kegiatan Pembinaan dan pemantauan aparaturnya penanganan konflik dalam rangka upaya peningkatan peran serta masyarakat untuk menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara	58,408	125,000	101,829	88,000	211,334	-	54,297	124,999	101,829	88,000	211,320	-	92.96	100	100	100	99.99	-	29,33	31,23
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		293.008	329.271	297.839	246.310	373.227	343.697	293.008	327.062	295.961	241.999	364.509	305.955	100	99,33	99,37	98,25	97,66	89,02	2,70	0,72
1	Kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	113,130	151,330	134,069	165,775	187,347	72,280	113,130	150,830	132,491	164,614	181,906	155,195	100	99.67	98.82	99.30	97.10	90.08	7,26	5,41
2	Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	179,878	177,941	163,770	80,535	-	-	179,878	176,232	163,470	77,385	-	-	100	99.04	99.82	96.09	-	-	(18,20)	(19,01)
3	Kegiatan Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	185,880	171,417	-	-	-	-	182,603	150,760	-	-	-	-	98.24	87.95	(3,97)	(9,14)
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		76.284	103.547	74.016	814.136	987.449	578.457	76.008	102.894	73.406	1.150.758	966.497	479.002	99,64	99,34	99,18	-	97,88	82,81	40,17	35,91
1	Kegiatan fasilitasi pencapaian halakoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	76,284	103,574	74,016	-	-	-	76,008	102,894	73,406	-	-	-	99.64	99.34	99.18	-	-	-	(1,00)	(1,15)

2	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	-	-	-	92,090	88,323	93,457	-	-	-	91,023	82,209	-	-	-	-	98.84	93.08	-	0,49	(4,96)
3	Kegiatan Sosialisasi TMMD ke 90 dan ke 91 wesbang dan Bela Negara	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	491,021	-	-	-	-	-	98.20	-	-	0,00	0,00
4	Kegiatan Sosialisasi TMMD ke 92 dan ke 93 wesbang dan Bela Negara	-	-	-	-	496,228	-	-	-	-	-	489,689	-	-	-	-	-	-	98.68	0	0
5	Kegiatan Sosialisasi TMMD ke 94 dan ke 95 wesbang dan Bela Negara	-	-	-	-	-	485,000	-	-	-	-	-	479,002	-	-	-	-	-	98.76	0	0
6	Kegiatan peningkatan Jati Diri bangsa (NCB)	-	-	-	95,809	249,033	-	-	-	-	457,977	248,227	-	-	-	-	478.01	99.68	-	61,22	(26,38)
7	Kegiatan penguatan Fokus Group Decition (FGD)	-	-	-	126,237	153,865	-	-	-	-	110,737	146,372	-	-	-	-	87.72	95.13	-	10,40	14,97
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan		108.472	140.000	165.048	231.400	527.574	257.007	108.427	140.000	163.992	230.835	518.877	234.064	100	100	99,36	99,76	98,35	91,07	15,46	13,68
1	Kegiatan pembinaan dan pemantapan forum kawasapadaan dini masyarakat dalam rangka memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat dan penanggulangan bencana (Permendagri no 12 Tahun 2006)	108,472	140,000	165,048	231,400	527,574	257,007	108,472	140,000	163,992	230,835	518,877	234,064	100	100	99.36	99.76	98.35	91.07	15,46	13,68
Program Pendidikan Politik dan Masyarakat		316.354	298.000	631.510	2.2422.913	926.083	803.635	312.054	296.977	623.903	2.149.418	856.850	781.565	98,64	99,66	98,80	88,71	92,52	97,25	16,81	16,53
1	Kegiatan Koordinasi Forum diskusi Politik	164,497	175,000	231,932	434,114	500,289	358,557	160,597	174,248	228,896	423,128	437,463	347,909	97.63	99.57	98.69	97.47	87.44	97.03	13,87	13,75
2	Kegiatan penyusunan data base (Parpol, Ormas, OKP, LSM dan Keagamaan)	73,806	123,000	123,000	-	-	-	73,756	122,729	122,729	-	-	-	99.93	99.78	99.78	-	-	-	18,56	18,50
3	Kegiatan monitoring evaluasi parpol, ormas, lsm, okp, lembaga agama/pewakilan di daerah	78,051	-	276,578	136,550	158,231	170,078	77,701	-	272,278	136,350	157,306	168,384	99.55	-	98.45	99.85	99.42	99.00	13,86	13,76
4	Kegiatan pembinaan fasilitasi ormas,	-	-	-	,852,249	267,563	275,000	-	-	-	1,589,940	262,081	265,272	-	-	-	85.84	97.95	96.46	(47,05)	(44,95)

	Lsm, Okp, dan BEM Provinsi Jambi																				
	Program Perwujudan Demokrasi Yang Makin Kokoh	350.978	262.300	434.945	601.956	1.016.848	665.194	349.918	261.870	424.870	596.964	982.492	639.084	99,70	99,84	97,68	99,17	96,62	96,07	11,24	10,56
1	Kegiatan Fasilitasi pemilu dan pilkada serta pengembangan partisipasi politik di daerah	272,623	150,000	239,482	483,090	869,290	526,548	271,613	149,570	235,862	478,098	834,934	501,599	99.63	99.71	98.49	98.97	96.05	95.26	11,60	10,76
2	Kegiatan peningkatan dan pengembangan kualitas proses politik bagi lembaga parpol	78,355	112,300	195,463	118,866	147,558	138,646	78,305	112,300	189,008	118,866	147,558	137,485	99.94	100	96.70	100	100	99.16	9,98	9,84

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

Kondisi lingkungan kerja yang tentunya dapat memberikan dukungan yang optimal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, program kerja Badan/instansi serta stakeholder guna terwujudnya visi pembangunan daerah dan pencapaian sasaran program Pembangunan menuju Jambi MANTAP 2021-2026.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dari Tahun 2015 sampai dengan 2021, telah diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

- a. Masih perlunya peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah di Provinsi Jambi;
- b. Masih Perlunya peningkatan wawasan kebangsaan, rasa nasionalisme dan cinta tanah air dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Perlunya mengikut sertakan kapasitas Ormas dalam pembangunan Daerah di Provinsi Jambi;
- d. Memfasilitasi konflik sosial yang ada di daerah Provinsi Jambi;
- e. Masih terdapatnya aksi peyebarluasan ideologi yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Tabel 3.11
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih Rendahnya Pemahaman Masyarakat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesatuan bangsa	Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme
			Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi
			Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah.
			Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya degradasi moral dan budaya di masyarakat.
			Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan
			Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial
			Berkurangnya ketahanan ekonomi masyarakat, yang bisa menimbulkan kerawanan sosial dan konflik di masyarakat.

		Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap politik	Belum optimalnya peran partai politik dalam proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi
			Rendahnya pemahaman tentang etika dan budaya politik demokratis
			Masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dibanding nasional.
			Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu

3.2. Telaahan Visi, Misi, Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi periode 2021-2024 melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) langsung oleh rakyat (Rapat Pleno KPU Provinsi Jambi) pada tanggal 3 Juni 2021. Dimana Al Haris-Abdullah Sani meraih suara terbanyak dan dilantik pada tanggal 12 Juli Tahun 2021 oleh Presiden Republik Indonesia.

Adapun Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi terpilih periode 2021 – 2026 adalah :

“TERWUJUDNYA JAMBI LEBIH MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB, AMANAH DAN PROFESIONAL DIBAWAH RIDHO ALLAH SWT, (JAMBI MANTAP)”

Sedangkan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2021 – 2026 antara lain:

MISI PERTAMA : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan

Yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung egovernment yang terintegrasi.

MISI KEDUA : Memantapkan Perekonomian Masyarakat Daerah

Yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan local untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.

MISI KETIGA : Memantapkan Kualitas SDM

Yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

Ketigamisi di atas dimaksudkan untuk menciptakan sosok Jambi yang Lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah, dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, sebagai salah satu lembaga teknis Pemerintah Provinsi Jambi, memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan **Misi Ketiga** Pemerintah Provinsi Jambi, yaitu :

“Mementapkan Kualitas SDM”

Dari misi ketiga tersebut, sasaran yang ingin di capai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah :

Memantapkan Perekonomian Masyarakat Daerah Melalui Kerukunan Antar Suku dan Antar Umat Beragama. Untuk mencapai sasaran tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan Program Kegiatan yaitu:

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Serta di Dukung oleh Program-program yang lain.

3.3 Telaah Renstra K/L.

Berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (ditetapkan pada tanggal 06 Agustus 2020). Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Dari penjelasan Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang tersebut diatas dapat disimpulkan mengenai keterkaitan Tugas dan Fungsi Kesbangpol Provinsi Jambi mengarah kepada Misi Kementerian Dalam Negeri yang berbunyi ;

"Memantapkan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan Memperkuat Pengamalan terhadap Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Kebhinekaan, Menegakkan Persatuan dan Kesatuan, Demokratisasi, Serta Membangun Karakter Bangsa dan Stabilitas Dalam Negeri".

Sedangkan Tujuan Strategis adalah :

“Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara”

Sasaran Strategis :

1. Terpeliharanya Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
2. Terpeliharanya Stabilitas Politik Dalam Negeri Dalam Rangka Mewujudkan Demokrasi Yang Berkualitas.

Arah Kebijakan dan Strateginya adalah:

“Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila”

Melalui Strategi:

1. Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;
3. Peningkatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;
4. Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
5. Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan gangguan keamanan dalam negeri.

A. Analisis Kondisi Internal.

1) KEKUATAN / *STRENGTH* (S)

- a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi memiliki m dan misi yang jelas;

- b) Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi diatur dengan jelas melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008;
- c) Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi diatur dengan jelas melalui Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008;
- d) Terselenggaranya Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik melalui kegiatan Forum Diskusi Politik dan Pemantauan Pemilu dan pemilukada sehingga melalui kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat;
- e) Terselenggaranya Program penguatan ideologi pancasila dan kerakter kebangsaan melalui kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara, Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan, FKUB, FPK, dan TMMD, sehingga dapat Meningkatkan Rasa Nasionalisme dan cinta tanah air di dalam masyarakat Khususnya Generasi Muda;
- f) Terselenggaranya program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan serta bagi Lembaga Parpol, Monitoring dan Evaluasi Parpol, Ormas, OKP dan Lembaga Keagamaan, Pembinaan dan Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan, LSM, OKP dan BEM dan Kegiatan Kerjasama Bidang Kesbangpol Dalam Negeri dengan Organisasi Kemasyarakatan, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan peran kapasitas Organisasi kemasyarakatan untuk mendukung Pembangunan di Daerah;
- g). Terselenggaranya Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan

Budaya melalui Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;

- h). Terselenggaranya program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial, melalui kegiatan FKDM, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TIMDU), Pembinaan dan Pemantauan Orang Asing, LSM asing dan Lembaga Asing, Pemantauan dan Pemetaan Potensi Konflik, Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Jambi dan Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan mampu menjaga dan meningkatkan ketertiban dan keamanan dengan Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik dan Pemulihan Paska Konflik yang ada di masyarakat Daerah Provinsi Jambi.

2) KELEMAHAN / *WEAKNESSES* (W)

- a) Kualifikasi sumber daya manusia belum sesuai sehingga belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi;
- b) Belum adanya *Standard Operating Procedures* (SOP) sehingga menyulitkan dalam penentuan indikator sasaran baik *output* maupun *outcome* program dan kegiatan;
- c) Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan belum memadai;
- d) Dukungan dana untuk penyelenggaraan pelayanan sesuai tupoksi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi Jambi belum optimal.

B. Analisis Kondisi Eksternal

1) PELUANG / *OPPORTUNITIES* (O)

- a) Berkembangnya reformasi politik yang berpengaruh terhadap perkembangan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat;
- b) Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memudahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- c) Kultur masyarakat Jambi yang religius dan bersifat gotong royong;
- d) Keberagaman suku dan budaya di Provinsi Jambi;
- e) Dukungan instansi terkait lain yang mempermudah penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan;
- f) Perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih mengarah kepada pelayanan masyarakat;
- g) Adanya penyesuaian kelembagaan Pusat sehingga mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang lebih terarah dan terfokus.

2) ANCAMAN / *THREATS* (T)

- a) Pengaruh negatif globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi di Jambi;
- b) Ideologi bangsa yang tidak mengakar ke dalam hati dan kehidupan masyarakat yang diiringi dengan fenomena munculnya ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila;
- c) Menurunnya rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air di masyarakat;
- d) Faktor geografis dan demografis yang menyulitkan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;

- e) Faktor otonomi daerah yang menyebabkan adanya perbedaan nomenklatur dengan Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota sehingga menghambat dalam pelaksanaan koordinasi;
- f) Adanya beberapa ketidakjelasan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga melemahkan posisi dan menimbulkan kerancuan tugas pokok dan fungsi Badan.

C. STRATEGI SEBAGAI KUNCI KEBERHASILAN BERDASARKAN ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Berdasarkan *SWOT Analysis* terhadap lingkungan internal dan eksternal di atas, misi, tujuan, dan sasaran, sebagai berikut :

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi harus mempergunakan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada;
- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengatasi ancaman dengan mengoptimalkan Program dan kegiatan;
- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi harus dapat mengatasi kelemahan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada;
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi harus dapat meningkatkan Peran Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) untuk mendukung Pembangunan Daerah;

- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi harus dapat meningkatkan Kualitas Partisipasi Politik dalam Pemilu dan Pemilukada dengan meningkatkan Pendidikan Politik Masyarakat;
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi harus dapat meningkatkan pemahaman Wawasan Kebangsaan, Nasionalisme, dan Cinta Tanah Air dalam memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam wadah Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi harus mewaspadai, memfasilitasi, mencegah segala macam Potensi Konflik sosial yang ada agar tidak menghambat penyelenggaraan pelayanan bagi pencapaian visi dan misi.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan syarat utama bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu upaya dan langkah untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa perlu senantiasa dilakukan secara dinamis berdasarkan perkembangan situasi yang dihadapi. Secara obyektif bangsa Indonesia di bangun diatas kemajemukan sehingga berpotensi terhadap kerawanan sosial, politik, dan kewilayahan yang dapat mengarah timbul nya konflik social di masyarakat yang berdimensi horizontal maupun vertikal. Selain kemajemukan masyarakat Indonesia yang rawan konflik, masih terdapat beberapa permasalahan lainnya yang satu sama lain saling mengait seperti implementasi otonomi daerah yang belum tuntas, kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan social ekonomi, serta rendahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum yang merupakan hambatan yang signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan berpotensi terhadap disintegrasi bangsa.

Disamping fenomena factual tersebut di atas, kondisi kehidupan masyarakat masih dihadapkan pada kurangnya kesadaran demokrasi dan berpolitik serta kelestarian lingkungan sehingga berpengaruh terhadap semakin merosotnya indeks pembangunan manusia yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor ancaman dalam perwujudan ketahanan bangsa dan kehidupan masyarakat. Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di Provinsi Jambi, dapat dikemukakan beberapa masalah yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, yaitu :

1) Pendidikan politik masyarakat masih rendah.

Pendidikan politik masyarakat yang masih rendah dapat dilihat dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada serta masih maraknya konflik-konflik yang muncul dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pemilukada.

2) Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah.

Permasalahan krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkai berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan.

Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah dapat dilihat dari tingkat penegakan hukum (*law enforcement*) yang masih rendah dan peningkatan resistensi masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah, antara lain dalam bentuk unjuk rasa dan demonstrasi.

3) Kurangnya Harmonisasi kehidupan bermasyarakat cenderung menurun.

Menurunnya harmonisasi kehidupan bermasyarakat dapat dilihat dari kecenderungan semakin maraknya konflik dan kekerasan komunal (*conflict and communal violence*) di tengah masyarakat, seperti sengketa lahan,

tawuranan tarsuku/warga dan pertentangan antar komunitas/kelompok masyarakat.

4) Potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya di bidang teknologi, informasi, budaya, dan ekonomi memunculkan eksese-eksese negative dengan muncul nya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional dan transnasional.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada saat ini dan beberapa permasalahan diatas serta melalui evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta Telaah Renstra Kementrian Dalam Negeri. Isu isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas partisipasi politik masyarakat, sehingga masih perlu ditingkatkannya pendidikan politik masyarakat terutama pada pemilih pemula;
2. Masih perlunya peningkatan Wawasan Kebangsaan, nasionalisme dan cinta tanah air dalam memeperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di dalam wadah kesatuan bangsa dan politik;
3. Perlunya peningkatkan peran Organisasi Kemasyarakatan untuk mendukung pembangunan daerah;
4. Meningkatnya konflik sosial terutama konflik sengketa lahan di daerah Provinsi Jambi;
5. Meningkatnya aksi penyebarluasan ideologi yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila dan antisipasi bahaya aksi terorisme dan radikalisme di daerah Provinsi Jambi.

6. Meningkatkan pengakuan persamaan derajat, kewajiban dan hak azasi manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial atau warna kulit;
7. Meningkatkan upaya penyelesaian perselisihan secara damai dengan mengutamakan musyawarah mufakat;
8. Meningkatkan koordinasi antar pimpinan kearah dalam rangka menekan potensi konflik;
9. Perlunya penelitian pemetaan wilayah potensi konflik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.

1. Tujuan

Untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi serta memecahkan permasalahan dalam menangani isu strategis daerah yang dihadapi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2021-2026, yaitu :

- a. Mengembangkan Kehidupan Demokrasi Yang Dinamis Berdasarkan Pancasila Dan Berwawasan Kebangsaan.
- b. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

2. Sasaran

Sebagai sasaran dari tujuan tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi selanjutnya menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2021-2026, yaitu :

- a. Meningkatnya Situasi Politik Daerah Yang Kondusif.
- b. Meningkatnya Kehidupan Demokrasi Yang Dinamis.
- c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
- d. Meningkatnya Kualitas Implementasi Akuntabilitas Kinerja.

Pada Tabel berikut ini disajikan tujuan dan sasaran jangka menengah dalam penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, yang dilengkapi dengan indikator sasaran untuk pencapaian target pelayanan selama 5 (lima) tahun.

Tabel 4.12
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2021-2026
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN (%)					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Mengembangkan Kehidupan Demokrasi Yang Dinamis Berdasarkan Pancasila dan Berwawasan Kebangsaan	Meningkatnya Situasi Politik Daerah Yang Kondusif	Indeks Aspek Hak-hak Politik	57,3	60,59	63,88	67,17	70,46	73,75
		Meningkatnya Kehidupan Demokrasi Yang Dinamis	Indeks Aspek Kebebasan Sipil	87,95	89,95	92,45	94,95	97,45	97,45
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85	85	85	85	85
		Meningkatnya Kualitas Implementasi Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	A	A	A	A

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan Strategi dan Kebijakan yang merupakan pedoman atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program kegiatan dalam periode 2021-2026 Menuju Jambi MANTAP. Dalam tabel berikut disajikan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan untuk setiap Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

Tabel 5.13

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

Visi : Jambi lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridha Allah SWT.			
Misi 1 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintah			
Misi 3 : Memantapkan kualitas SDM			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengembangkan kehidupan demokrasi yang dinamis	Terwujudnya demokrasi yang dinamis	Mengembangkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembaruan Kebangsaan.	Revitalisasi FKUB sehingga dapat menjadi lembaga yang optimal bagi para tokoh Agama, Masyarakat dan pemerintah.

Pada tabel diatas, telah tergambar dengan jelas tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi yang tertuang dalam visi dan misi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menjabarkan dalam 3 (tiga) misi dimana masing- masing misi dijelaskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.

Misi 3 : yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

Meningkatkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam kerukunan intra dan antar umat beragama, meningkatkan dan menguatkan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi 2021 dengan menggunakan metode baru (*aspek kebebasan, aspek kesetaraan dan aspek kapasitas lembaga demokrasi*) serta penguatan rencana aksi gangguan keamanan dalam Provinsi Jambi.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Periode 2021-2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan sejumlah Program yang merupakan instrumen kebijakan yang mencakup satu atau lebih kegiatan. Program-program tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

6.2 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai tujuan setiap Program, maka pada setiap program dituangkan dalam kegiatan sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan suatu keluaran (*output*) yang selaras dengan tujuan Program. Kegiatan dan sub kegiatan pada setiap Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Itiari Realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1) Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
 - 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 - 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 - 3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 - 4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 - 5) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 - 6) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
 - 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
 - 2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
 - 3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
 - 4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

- 5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
 - 1) Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
 - 2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
 - 3) Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
 - 4) Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
 - 5) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya.

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

- 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- 2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- 3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- 4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- 5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

- 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
- 2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
- 3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
- 4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

- 5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Tabel 6.14

Perubahan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaa												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022 (Tahun ke-2)		Tahun 2023 (Tahun ke-3)		Tahun 2024 (Tahun ke-4)		Tahun 2025 (Tahun ke-5)		Tahun 2026 (Tahun ke-6)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				18.351.850.000		20.317.850.000		23.304.100.000		23.378.600.000		25.680.000.000		36.845.681.653 1.096.321.250.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
1. Mengem bang kan Kehidupan Demokrasi Yang Dinamis Berdasarkan Pancasila Dan Berwawasan Kebangsaan 2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Meningkatkan situasi politik daerah yang kondusif 2. Meningkatkan kehidupan demokrasi yang dinamis 3. Meningkatkan nya Kualitas Pelayanan Publik 4. Meningkatkan nya Kualitas implementasi Akuntabilitas Kinerja	8.01	BADAN KESBANGPOL PROV. JAMBI				18.351.850.000		20.317.850.000		23.304.100.000		23.378.600.000		25.680.000.000		36.845.681.653 1.096.321.250.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
Meningkatkan Kapasitas sumber daya aparatur yang berkualitas	Meningkatnya persentase pelayanan Administrasi Perkantoran	8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya Predikat SAKIP	79 (BB)	80	10.563.350.000	82	11.679.350.000	84	11.791.600.000	84	10.998.600.000	85	12.390.000.000	85	11.427.500.000 52.816.750.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi

Meningkatkan kualitas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memfasilitasi Program dan Rencana Kerja Aparatur Badan Kesbang dan Politik	Terlaksananya Rencana kerja dan terhimpun/ tersusun dengan baik, lengkap, akurat untuk dapat menjadi laporan.	8 01 01 1.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya program Kegiatan dan Renja Badan Kesbangpol Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90 %	95 %	285.000.000	95 %	308.000.000	95 %	350.000.000	95 %	380.000.000	95 %	405.000.000	95 %	405.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
		8 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	12 Dok	80.000.000	12 Dok	80.000.000	12 Dok	100.000.000	14 Dok	110.000.000	14 Dok	125.000.000	74 Dok	125.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
		8 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Ralisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 laporan	12 lap	180.000.000	12 lap	200.000.000	12 lap	220.000.000	14 lap	235.000.000	14 lap	240.000.000	74 lap	240.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
		8 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5 lap.	25.000.000	5 lap.	28.000.000	5 lap.	30.000.000	5 lap.	35.000.000	5 lap.	40.000.000	25 lap.	40.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
Terwujudnya administrasi keuangan yang baik	Terpenuhinya data laporan keuangan	8 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlaksananya adminisrasi keuangan perangkat daerah	95 %	100 %	8.760.000.000	100 %	8.775.000.000	100 %	8.775.000.000	100 %	8.790.000.000	100 %	9.050.000.000	100 %	9.050.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
	ASN lingkup Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	8 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Badan Kesbangpol Provinsi Jambi Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bln	8.500.000.000	14 bln	8.500.000.000	14 bln	8.500.000.000	14 bulan	8.500.000.000	14 bln	8.750.000.000	14 bln	8.750.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
	Terdukungnya biaya jasa pengelola Administrasi Keuangan	8 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersusunnya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	12 bulan	12 bulan	260.000.000	12 bulan	275.000.000	12 bulan	275.000.000	12 bulan	290.000.000	12 bulan	300.000.000	12 bln	300.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi

	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	08.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD															
	Tersedianya Laporan Keuangan Badan Kesabngpol	08.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	08.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan															
	Tersedianya Laporan Keuangan/koord Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	08.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD															
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	08.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran															
Terwujudnya administrasi kepegawaian yang lengkap	Terwujudnya peningkatan disiplin ASN	8 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase tertatanya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100 %	73.750.000	100 %	76.250.000	100 %	82.000.000	100 %	87.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi

	ASN & Non ASN lingkup Badan Kesbangpol Prov.Jambi	8 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian pegawai Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	74 paket 74 paket	75 stel 75 paket	48.750.000	74 stel 80 paket	48.750.000	80 stel 82 paket	52.000.000	80 stel 85 paket	52.000.000	80 stel 90 paket	60.000.000	300 stel 100 paket	60.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
	ASN lingkup Badan Kesbangpol Prov.Jambi	8 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya kebutuhan pegawai mengikuti diklat/kursus Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/kursus/ pelatihan	1 tahun 10 orang	1 thn 8 orang	25.000.000	1 th 10 orng	27.500.000	1 th 12 orng	30.000.000	1 th 14 orng	35.000.000	1 th 16 orng	40.000.000	1 th 70 orng	40.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	Terwujudnya pelayanan kantor dengan baik	8 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 % 95 %	95 % 95 %	473.000.000	95 % 95 %	505.400.000	95 % 95 %	534.600.000	95 % 95 %	583.600.000	95 % 95 %	620.000.000	95 % 95 %	650.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	8 01 01 1.06 01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen listrik kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Th 1 paket	1 Th 1 paket	27.500.000	1 th 1 paket	30.000.000	1 th 1 paket	32.000.000	1 th 1 paket	35.000.000	1 th 1 paket	40.000.000	1 th 1 paket	40.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	8 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 th 1 paket	1 Th 1 paket	52.000.000	1 th 1 paket	55.000.000	1 th 1 paket	55.000.000	1 th 1 paket	55.000.000	1 th 1 paket	60.000.000	1 th 1 paket	60.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	8 01 01 1.06 05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan 1 paket	12 bulan 1 paket	55.000.000	1 paket 1 paket	60.000.000	1 paket 1 paket	65.000.000	1 paket 1 paket	70.000.000	1 paket 1 paket	75.000.000	6 paket 1 paket	75.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terakomodirnya informasi secara akurat Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Media Cetak 6 dokumen	10 Media Cetak 10 dok	18.500.000	10 dok 10 dok	20.400.000	12 dok 12 dok	22.600.000	12 dok 12 dok	23.600.000	12 dok 12 dok	25.000.000	62 dok 62 dok	25.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi

	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	8 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	-	-	-	-	10 laporan	50.000.000	10 laporan	60.000.000	10 lap	65.000.000	12 lap	75.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terdukungnya koordinasi kedalam dan luar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Th 4 laporan	1 Th 4 lap	320.000.000	1 th 4 lap	340.000.000	1 th 4 lap	360.000.000	1 th 4 lap	400.000.000	1 th 4 lap	420.000.000	1 th 20 lap	450.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
Menyediakan kebutuhan Barang milik kantor	Terpenuhinya kebutuhan barang milik kantor	8 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terakomodirnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terakomodir Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	172.000.000	100 % 100 %	1.160.000.000	100 % 100 %	1.150.000.000	100 % 100 %	220.000.000	100 % 100 %	1.200.000.000	100 % 100 %	240.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 01 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Mobil dan 12 Motor	-	-	1 mobil 2 motor 1 mobil 2 motor	500.000.000	1 Mobil 2 Motor 1 Mobil 2 Motor	500.000.000	-	-	1 mobil 2 Motor 1 mobil 2 Motor	500.000.000	3 mobil 2 motor 3 mobil 2 motor	1.500.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Opraasional atau Lapangan	Terlaksana Pengadaan Kendaraan Dinas Oepraasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Mobil	-	-	1 Mobil 1 mobil	450.000.000	1 Mobil 1 mobil	450.000.000	-	-	1 Mobil 1 mobil	450.000.000	-	-	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	8 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya peralatan gedung kantor Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 unit 14 unit	20 unit 20 unit	172.000.000	21 unit 21 unit	210.000.000	20 unit 20 unit	200.000.000	22 unit 22 unit	220.000.000	22 unit 22 unit	250.000.000	120 unit 120 unit	240.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
		8 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Tersedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase Tersedianya	95 % 95 %	95 % 95 %	207.500.000	95 % 95 %	217.500.000	95 % 95 %	222.000.000	95 % 95 %	228.000.000	95 % 95 %	240.000.000	95 % 95 %	237.500.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi

			Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
	Lancarnya kebutuhan perangko, materai dan benda pos lainnya.	8 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Th 1 laporan	1 Th 1 lap	20.500.000 1 lap	1 Th 1 lap	20.500.000 1 lap	1 Th 1 lap	22.000.000 1 lap	1 Th 1 lap	23.000.000 1 lap	1 Th 1 lap	25.000.000 6 lap	1 Th 6 lap	22.500.000 6 lap	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
	Lancar dan terdukungnya fasilitas air, listrik dan telepon.	8 01 01 1.08 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik	Tersedianya biaya komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Th 4 laporan	1 Th 4 lap	133.000.000 4 lap	1 Th 4 lap	140.000.000 4 lap	1 Th 4 lap	140.000.000 4 lap	1 Th 4 lap	140.000.000 4 lap	1 Th 4 lap	145.000.000 24 lap	1 Th 24 lap	145.000.000 24 lap	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	8 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Th 4 laporan	1 Th 4 lap	54.000.000 4 lap	1 Th 4 lap	57.000.000 4 lap	1 Th 4 lap	60.000.000 4 lap	1 Th 4 lap	65.000.000 4 lap	1 Th 4 lap	70.000.000 4 lap	1 Th 4 lap	70.000.000 4 lap	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
		8 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	592.100.000 100 %	100 % 100 %	637.200.000 100 %	100 % 100 %	678.000.000 100 %	100 % 100 %	710.000.000 100 %	100 % 100 %	775.000.000 100 %	100 % 100 %	745.000.000 100 %	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Th 19 unit	1 Th 19 unit	295.000.000 20 unit	1 Th 20 unit	300.000.000 20 unit	1 Th 20 unit	310.000.000 20 unit	1 Th 20 unit	320.000.000 20 unit	1 Th 20 unit	350.000.000 20 unit	1 Th 20 unit	320.000.000 20 unit	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
	Terlaksananya	8 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan	Terlaksananya	1 Th	1 Th	87.100.000	1 Th	87.200.000	1 Th	88.000.000	1 Th	90.000.000	1 Th	100.000.000	1 Th	100.000.000	Badan	Prov.

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		dan Mesin Lainnya	Pemeliharaanya peralatankerja													Kesbangpol Provinsi Jambi	Jambi	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	35 unit	40 unit		45 unt		50 unit		55 unit		260 unit				
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau BangunanLainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	210.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	280.000.000	12 Bulan	300.000.000	12 Bulan	325.000.000	12 Bulan	325.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit		2 unit	2 unit		2 unit		2 unit		6 unit				
Meningkatkan pengetahuan pengembangan berwawasan serta kesadaran berbangsa dan bertanah air	Tokoh masyarakat, tokoh agama, Aparatur Pemerintah dan Pemuda	8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pelaksanaan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	76%	76%	1.055.000.000	79%	1.200.000.000	80%	1.445.000.000	81%	1.620.000.000	83%	1.725.000.000	83%	7.045.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
		8 01 02 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologiPancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase terlaksananya Pembinaan Idiologi Pancasila dan Karakter Bangsa sertaBela NKRI	76%	76%	1.055.000.000	79%	1.200.000.000	80%	1.445.000.000	81%	1.620.000.000	83%	1.725.000.000	83%	7.045.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8 01 02 1.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Teknis Program dan Pemantapan pelaksanaan Bidang IdeologiPancasila dan Karakter Kebangsaan.	5 Progr Kerja	5 Prog Kerja	60.000.000	5 Prog Kerja	60.000.000	6 Prog Kerja	250.000.000	6 Prog Kerja	350.000.000	7 Prog Kerja	375.000.000	7 Prog Kerja	375.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
				Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	5 dok Prog.kerja	5 dok Prog.kerja		5 dok Prog.kerja		6 dok Prog.kerja		7 dok Prog.kerja		7 dok Prog.kerja					
	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,	8 01 02 1.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	Terlaksananya Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi tenaga pendididkan tokoh Masyarakat.	3 Dok	3 Dok	80.000.000	4 Dok	80.000.000	4 Dok	250.000.000	4 Dok	250.000.000	5 Dok	250.000.000	5 Dok	250.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
				Jumlah Kebijakan Teknis	3 dok.	3 dok.		4 dok.	3.600.000.000	4 dok.	5.000.000.000	4 dok.	5.000.000.000	5 dok	5.000.000.000	5 dok.	18.600.000.000		

	Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	kebijakan	Kebijakan		Kebijakan		Kebijakan		Kebijakan		Kebijakan		Kebijakan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
--	---	--	---	--	-----------	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara															
Mengembangkkan kehidupan demokrasi yang dinamis	Parpol, Lembaga Pendidikan, Masyarakat dan Lembaga lainnya	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pelaksanaan peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	77%	77%	2.970.000.000	79%	3.200.000.000	81%	4.450.000.000	83%	4.500.000.000	85%	4.540.000.000	85%	19.660.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
		8 01 03 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase terlaksana Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	77%	77%	2.970.000.000	79%	3.200.000.000	81%	4.450.000.000	83%	4.500.000.000	85%	4.540.000.000	85%	4.525.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	8 01 03 1.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Tersusunnya Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan situasi	6 Prog Kerja	6 Prog Kerja	-	6 Prog Kerja	200.000.000	6 Prog Kerja	225.000.000	6 Prog Kerja	225.000.000	6 Prog Kerja	235.000.000	6 Prog Kerja	235.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi

	Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Politik. Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	6 dok	6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok			
	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8 01 03 1.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Terlaksananya Dokumentasi Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui pendidikan Politik serta Budaya Politik. Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	11. Kab/Kota	11. Kab/Kota	-	11 Kab/Kota	-	11 Kab/Kota	200.000.000	11 Kab/Kota	225.000.000	11 Kab/Kota	225.000.000	11 Kab/Kota	225.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	8 01 03 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Terealisasinya Bantuan Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Jambi. Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	11 Parpol	11 Parpol	2.500.000.000	11 Parpol	2.500.000.000	11 Parpol	3.500.000.000	11 Parpol	3.500.000.000	11 Parpol	3.500.000.000	11 Parpol	3.500.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
					285 orang	350 org	400 org		450 org	500 org	500 org	500 org	500 org	500 org	500 org	500 org	500 org		

	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8 01 03 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terselenggaranya rakor bidang politik 2021 dan terpantaunya situasi politik daerah di Provinsi Jambi Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Politik. Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	72 Peserta 285 orang	80 Peserta 350 org	315.000.000 400 org	85 Peserta 450 org	335.000.000 450 org	85 Peserta 450 org	340.000.000 500 org	90 Peserta 500 org	350.000.000 550 org	100 Peserta 550 org	350.000.000 550 org	512 Peserta 550 org	350.000.000 550 org	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8 01 03 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya pemantauan dan sosialisasi Peratran Bantuan Parpol di Provinsi Jambi. Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Kab/Kota 8 laporan	6 Kab/kota 10 lap	155.000.000 11 lap	7 Kab/kota 12 lap	165.000.000 12 lap	8 Kab/kota 12 lap	185.000.000 236.500.000.000	9 Kab/kota 13 lap	200.000.000 236.500.000.000	10 Kab/kota 14 lap	230.000.000 236.500.000.000	10 Kab/kota 14 lap	215.000.000 710.000.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi

Mewujudkan Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	Ormas dalam negeri dan Ormas Asing di daerah	8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	90%	90%	1.273.500.000	90%	1.421.000.000	90%	2.065.000.000	90%	2.395.000.000	95%	2.450.000.000	95%	9.604.500.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
		8 01 04 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase meningkatnya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	90%	90%	1.273.500.000	90%	1.421.000.000	90%	2.065.000.000	90%	2.395.000.000	95%	2.450.000.000	95%	9.604.500.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
	Tersusunnya Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8 01 04 1.01 01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terbentuknya Database pendataan Ormasy, Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah Provinsi Jambi. Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	140 Ormasy. 4 dok.	168 Ormas 4 dok	207.000.000	196 Ormas 4 dok	250.000.000	234 Ormas 4 dok	320.000.000	280 Ormas 4 dok	380.000.000	280 Ormas 4 dok	380.000.000	1.158 Ormas 20 dok	1.650.728.960	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
	Tersusunnya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8 01 04 1.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksanannya Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	50 SKT 5 dok	55 SKT 5 dok.	-	60 SKT 5 dok.	-	65 SKT 5 dok.	200.000.000	70 SKT 5 dok.	220.000.000	75 SKT 5 dok.	250.000.000	325 SKT 25 dok.	670.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
	Terlaksananya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	8 01 04 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terjalinnnya Kerja sama Pemerinta Kesbangpol dalam dengan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi. Jumlah Orang Yang	18 Ormas 4 org	60 Ormas 4 org	931.500.000	78 Ormas 4 org	1.000.000.000	103 Ormas 4 org.	1.150.000.000	125 Ormas 4 org.	1.350.000.000	25 Orm 4 org	1.350.000.000	531 Ormas 20 org	6.450.135.200	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi

	Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah															
	Terlaksananya Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8 01 04 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi & Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas & Ormas Asing Di Daerah	Terlaksannya Koordinasi, Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, PengawasanOrmas dan Ormas Asing Di Daerah. Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	11 Kab/Kota 4 org	11 Kab/Kota 4 org	- 4 org	11 Kab/Kota 4 org	- 4 org	200.000.000 4 org	11 Kab/Kota 4 org	210.000.000 4 org	11 Kab/Kota 4 org	230.000.000 20 org	11 Kab/Kota 20 org	230.000.000 20 org	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi	
	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8 01 04 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan MediasiSengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	Termonitornya eksistensi/keberadaan sertapermasalahan ormas, Provinsi Jambi. Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	35 Ormas 4 lap	53 Ormas 4 lap	135.000.000 4 lap	63 Ormas 4 lap	171.000.000 4 lap	75 Ormas 4 lap	105 Ormas 4 lap	235.000.000 4 lap	105 Ormas 4 lap	240.000.000 4 lap	443 Ormas 4 lap	1.091.160.160 4 lap	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi	
Mewujudkan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tokoh Masy & Agama, Lembaga Pendidikan dan Ormas	8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	75%	85%	650.000.000	90%	840.000.000	92%	1.130.000.000	93%	1.185.000.000	95%	1.300.000.000	95%	5.105.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
		8 01 05 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang KetahananEkonomi, Sosial dan Budaya	Persentase terwujudnya peningkatan ketahanan ekososbud, fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi	75%	85%	650.000.000	90%	840.000.000	92%	1.130.000.000	93%	1.185.000.000	95%	1.300.000.000	95%	5.105.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi

				KUB dan penghayat kepercayaan															
	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8 01 05 1.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terbentuknya Database Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	6 Progr kerja 4 dok	8 Prog kerja 4 dok	110.000.000	8 Prog kerja 4 dok	120.000.000	8 Prog kerja 4 dok	150.000.000	9 Prog kerja 6 dok	180.000.000	10 Prog kerja 6 dok	200.000.000	10 Prog kerja 6 dok	170.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8 01 05 1.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksana Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	8 Dok 6 dok	9 Dok 6 dok	-	10 Dok 6 dok	-	12 Dok 4 dok	175.000.000	12 Dok 4 dok	175.000.000	13 Dok 6 dok	200.000.000	72 Dok 6 dok	550.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas	8 01 05 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kerukunan umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Provinsi Jambi.	12 Dok	12 Dok	482.000.000	15 Dok	500.000.000	17 Dok	540.000.000	18 Dok	560.000.000	20 Dok	600.000.000	94 Dok	3.123.790.500	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi

	Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 org	3 org		3 org		3 org		3 org		3 org		15 org			
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8 01 05 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang KetahananEkonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi antar Tim Pencegahan Narkotika, ForumKerukunan Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Provinsi Jambi. Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	49.323.180	11 kab/ kota 5 org	58.000.000	11 kab/ kota 5 org	70.000.000	11 kab/ kota 5 org	90.000.000	11 kab/ kota 5 org	95.000.000	11 kab/ kota 5 org	100.000.000	11 kab/ kota 25 org	100.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8 01 05 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi KerukunanUmat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksana Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		11 kab/ kota 4 lap	-	11 kab/ kota 4 lap	150.000.000	11 kab/ kota 4 lap	175.000.000	11 kab/ kota 4 lap	175.000.000	11 kab/ kota 4 lap	200.000.000	11 kab/ kota 25 lap	200.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi

Mewujudnya Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, TKA, Lembaga Asing, Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase pelaksanaan peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	78%	78%	1.840.000.000	80%	1.977.500.000	83%	2.422.500.000	85%	2.680.000.000	86%	3.275.000.000	86%	12.195.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
		8 01 06 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.499.999.980	78%	1.840.000.000	80%	1.977.500.000	83%	2.422.500.000	85%	2.680.000.000	86%	3.275.000.000	86%	12.195.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8 01 06 1.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terwujudnya peningkatan kewaspadaan dini, pemantauan orang asing/TKA/ Lembaga asing serta penanganan konflik di daerah. Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	10 dokumen	6 Prog kerja 10 dok	- 10 dok	6 Prog kerja 10 dok	- 10 dok	7 Prog Kerja 10 dok	145.000.000	8 Prog Kerja 10 dok	155.000.000	8 Prog kerja 10 dok	200.000.000	8 Prog kerja 10 dok	200.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,	8 01 06 1.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja	Tersusunnya Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja		12 Dok	-	12 Dok	-	13 Dok	150.000.000	15 Dok	275.000.000	15 Dok	275.000.000		275.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi

	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	12 dokumen	12 Dok		12 Dok		12 Dok		12 Dok		12 Dok		12 Dok			
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8 01 06 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi Tim Terpadu Penanganan konflik sosial Daerah dan Pusat dalam melaksanakan Rencana Aksi Daerah, pemantauan orang Asing/TKA. Serta Koordinasi antar Pimpinan Daerah. Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	428.942.580	11 Dok	500.000.000	11 Dok	520.000.000	12 Dok	600.000.000	13 Dok	620.000.000	13 Dok	650.000.000	10 Dok	650.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8 01 06 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi	Terkordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi	64.266.000	11 Kab/ Kota	75.000.000	11 Kab/ Kota	82.500.000	11 Kab/ Kota	100.000.000	11 Kab/Kota	100.000.000	11 Kab/ Kota	115.000.000	11 Kab/ Kota	115.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi

	Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20 org	20 org		20 org		20 org		20 org		20 org		20 org			
		8 01 06 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6.791.400	8 Kasus.	15.000.000	9 Kasus	25.000.000	11 Kasus	27.500.000	12 Kasu	30.000.000	12 Kasus	35.000.000	12 Kasus	35.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi
	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	8 01 06 1.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Terlaksananya Komunikasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ProvinsiJambi.	1.000.000. 000	Forko pimda Prov Jambi	1.250.000.000	Forko pimda Prov Jambi	1.350.000.000	Forko pimda Prov Jambi	1.400.000.000	Forko pimda Prov Jambi	1.500.000.000	Forko pimda Prov Jambi	2.000.000.000	Forko pimda Prov Jambi	2.000.000.000	Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Prov. Jambi

				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	10 dok.	10 dok.		10 dok.		10 dok.		10 dok.		10 dok.		10 dok.			
--	--	--	--	--	---------	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--	--

CATATAN :
WARNA MERAH ADALAH PERUBAHAN

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD tercapai.

Pada hakikatnya tugas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dengan demikian keterkaitan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dengan Misi Pemerintahan Provinsi Jambi difokuskan pada Misi ke Tiga yaitu ;

"Memantapkan Kualitas SDM"

yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

Sedangkan indikator kinerja yang terkait dengan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, yang merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

Pada dasarnya IKU merupakan bagian dari indikator pencapaian sasaran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

Pada tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi berikut target capaian selama 5 (lima) Tahun.

Tabel 7.15

Indikator Kinerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jambi

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun (%)					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kebebasan Diskriminasi	93,47	93,60	93,80	94,05	94,30	94,50	94,50
2	Tersusunnya Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	95 %	95 %
3	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	75 %	85 %	90 %	92 %	93 %	95 %	95 %
4	Persentase Pelaksanaan Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	76 %	79 %	80 %	81 %	83 %	83 %	83 %
5	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	78 %	78 %	80 %	83 %	85 %	86 %	86 %
6	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.	77 %	77 %	79 %	81 %	83 %	85 %	85 %
7	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB

BAB VIII

P E N U T U P

Penetapan Program dan Kegiatan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini dilakukan dengan mengacu dan berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025. Oleh karena itu, sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunan Renstra ini, maka setiap Bidang, Subbidang, dan Subbagian dalam jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi diharapkan menjadikan Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun dan menetapkan program dan kegiatan selama 5 (lima) Tahun kedepan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dimaksud sangat ditentukan oleh kesamaan Visi, Misi dan keterpaduan serta komunikasi dalam menciptakan sinergi antara upaya segenap jajaran Badan Kesatuan bangsa dan Politik provinsi Jambi dan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra ini sangat dipengaruhi oleh dukungan dan partisipasi semua pihak yang terkait, khususnya dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

Pada sisi lain, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dan tujuan dalam Renstra ini akan menjadi tolok ukur kinerja jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, baik secara individual maupun secara kelembagaan. Oleh karena itu, perlu ada komitmen setiap pihak serta koordinasi secara kelembagaan sehingga Renstra ini dapat diimplementasikan dengan baik.

Demikianlah Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi Jambi Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat strategis, Rencana Strategis (Renstra) ini tetap terbuka untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Jambi, Maret 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAMBI

H. MUKTI, SE,ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19701112 199903 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan dan rahmatnya Perencanaan Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan program dan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya. Dalam kerangka waktu pencapaian tujuan, Perencanaan tersebut disusun dalam bentuk Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah, dan Perencanaan Tahunan, yang masing-masing harus selaras satu dengan yang lain dan memiliki program yang berkesinambungan.

Dalam kerangka tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menyusun RENSTRA Tahun 2021-2026. RENSTRA ini merupakan perencanaan lima tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan dalam periode tahun 2021-2026. Oleh karena itu perencanaan strategis tersebut merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai alat bantu dan menjadi tolok ukur dalam mengemban amanat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jambi tahun 2021-2026.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan RENSTRA ini, diucapkan terima kasih. Semoga upaya dan partisipasi tersebut merupakan salah satu wujud nyata pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Jambi, Maret 2023
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAMBI

H. MUKTI, SE,ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19701112 199903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAMBI	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	10
2.2 Sumber Daya Aparatur	19
2.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana	19
2.4 Kinerja Pelayanan SKPD	23
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	29

BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	39
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi	39
3.2	Telaahan Visi dan Misi Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	41
3.3	Telaahan Renstra K/L	43
3.4	Penentuan Isu-Isu Strategis	49
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	50
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	50
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	54
6.1	Rencana Program	54
6.2	Rencana Kegiatan	54
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	80
BAB VIII	PENUTUP	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Program, Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026	4
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jambi (data Agustus 2021).....	20
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jambi Menurut Esselonering (data Agustus 2021)	20
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jambi Menurut Jenis Pendidikan Terakhir (data Agustus 2021)	21
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jambi Menurut Jenis Golongan (data Agustus 2021)	21
Tabel 2.6	Rekapitulasi Barang Inventaris Badan Kesbangpol Provinsi Jambi (data Desember 2021)	23
Tabel 2.7	Rencana Pemenuhan Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangpol Provinsi Jambi	24
Tabel 2.8	Rencana Pemeliharaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi	24
Tabel 2.9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	34
Tabel 3.11	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran.....	40
Tabel 4.12	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan 2021-2026	51

Tabel 5.13	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	52
Tabel 6.14	Rencana Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	62
Tabel 7.15	Indikator Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jambi	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22
------------	---	----